



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 317/PP.09-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis Pengamanan Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boyolali Nomor 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 8 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 8 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,

FEBRIKA INDRIARTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 317/PP.09-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan dengan tata kelola yang baik, profesional dan berintegritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dengan tepat, akurat, akuntabel dan efisien. Salah satu perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan terdiri atas perlengkapan pemungutan suara yaitu surat suara.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut diperlukan ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan ini dimaksudkan agar menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Boyolali dan pihak-pihak terkait dalam pengamanan surat suara. Adapun tujuan Pedoman Teknis ini adalah memberikan pedoman bagi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam kegiatan pengamanan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 baik di percetakan dan di KPU Kabupaten Boyolali.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan meliputi:

1. Pengamanan di Percetakan;
2. Pengamanan di KPU Kabupaten Boyolali.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Boyolali, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 di wilayah Kabupaten Boyolali.
11. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.

13. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tujuan.
14. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
15. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya disebut Percetakan adalah perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
16. Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, dan memisahkan/memilah Surat Suara dengan kualitas baik dan rusak/cacat.
17. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan KPU Kabupaten Boyolali.
18. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan per KPU Kabupaten Boyolali.
19. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam kondisi aman dan baik.
20. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Boyolali, dan dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Boyolali ke TPS, sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGAMANAN DI PERCETAKAN

A. Pengamanan Pencetakan dan Penghitungan

1. Pencetakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan.
2. Pencetakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk Surat Suara Pilbup Boyolali 2020.
3. Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali, serta harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan Surat Suara.
4. Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), Percetakan wajib melaporkan kepada tim Pengamanan Surat Suara.
5. Tim Pengamanan Surat Suara menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk kelebihan Pencetakan Surat Suara Pilbup Boyolali 2020.
6. KPU Kabupaten Boyolali meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.
7. KPU Kabupaten Boyolali membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.
8. Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
9. Tim Pengamanan Surat Suara bertugas:
 - a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
 - c. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 - d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
 - e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Boyolali;

- f. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
 - g. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
 - h. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui Sekretaris KPU Boyolali,
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada angak 9 (sembilan) huruf g dan huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- B. Pengamanan Pengepakan dan Penyimpanan.
- 1. Proses Pengepakan Surat Suara dilakukan setelah proses sortir untuk memastikan kondisi Surat Suara dalam keadaan baik, tepat jumlah, tidak ada bekas jarum dan jejak roll penekan kertas.
 - 2. Pengepakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Suara dilipat 1 (satu) lipatan;
 - b. setiap 100 (seratus) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
 - c. setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik atau sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam boks;
 - d. boks ditutup dengan rapi, dilakban, dan *strapping band* menyilang, serta bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Boyolali tujuan pengiriman, jenis Surat Suara, jumlah lembar Surat Suara, dan nomor boks;
 - e. setiap boks disusun terpisah per kabupaten dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman;
 - f. bahan pengepakan harus menggunakan bahan yang berkualitas baik; dan
 - g. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, rapi, dan tidak merusak Surat Suara.
 - 3. Selama proses Pencetakan di Percetakan, Surat Suara yang telah dilakukan Pengepakan harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan Surat Suara.
 - 4. Tempat Penyimpanan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. areal gudang bebas banjir;
 - b. instalasi listrik cukup memadai;
 - c. pintu gerbang yang aman;

- d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik;
- e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
- f. tersedia palet/ganjal barang;
- g. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
- h. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
- i. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang;
- j. tersedianya alat pemindahan barang; dan
- k. tersedia televisi sirkuit tertutup/*closed circuit television*;

C. Pengamanan Pendistribusian

1. Pada tahap persiapan Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan ke KPU Kabupaten Boyolali, KPU Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan Percetakan atau dengan penyedia layanan distribusi; dan
 - b. melakukan sinkronisasi jadwal Pendistribusian Surat Suara dengan penyedia layanan distribusi.
2. Percetakan yang memiliki moda angkutan distribusi atau Percetakan yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan Pendistribusian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/ klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
 - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

- g. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
 - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - i. memiliki pertanggungan asuransi.
3. Dalam pelaksanaan pengamanan Pendistribusian, Percetakan wajib untuk:
 - a. menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
 - b. menginformasikan jadwal pengiriman dan progres pengiriman per hari kepada KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Boyolali;
 - c. menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) Hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten Boyolali; dan
 - d. mengganti Surat Suara yang rusak selama Pendistribusian.
 4. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pengawalan Pendistribusian Surat Suara dalam rangka Pengamanan Surat Suara.
 5. Pengawalan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari Percetakan ke daerah tujuan, sampai dengan diserahkan kepada KPU Kabupaten Boyolali selaku pihak yang menerima.
 6. KPU Kabupaten Boyolali wajib melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.
 7. Pemantauan dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai dengan alamat tujuan.
 8. Pemantauan dilaksanakan dengan cara:
 - a. memeriksa Surat Suara yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan tingkatannya;
 - b. memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia layanan distribusi dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi yang tersedia ke alamat tujuan;
 - c. memastikan Surat Suara yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
 - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara sesuai jadwal dan/atau tahapan.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf d ditetapkan dalam pedoman teknis ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. Pengamanan Pemusnahan

1. KPU Kabupaten Boyolali wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan ketentuan, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
2. Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara Pilup Boyolali 2020 dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Percetakan;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali;
 - c. Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
3. Pemusnahan Surat Suara dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB III

PENGAMANAN DI KPU KABUPATEN BOYOLALI

- A. KPU Kabupaten Boyolali bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan.
- B. Pengamanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) meliputi pengamanan dalam:
 - a. penerimaan;
 - b. penyortiran dan pelipatan;
 - c. penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan; dan
 - d. pendistribusian.

1. Pengamanan Penerimaan

- a. Pejabat yang menerima Surat Suara di KPU Kabupaten Boyolali tujuan, melakukan pemeriksaan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli yang diterima dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 - 2) mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
 - (a) membuka kemasan/peti/koli satu per satu;
 - (b) memeriksa dan menghitung isi kemasan/peti/ koli;
 - (c) mencatat isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka;
 - (d) mencocokkan isi kemasan/peti/koli dengan Surat Jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 - (e) melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang.
- b. Pejabat yang menerima Surat Suara menuangkan penerimaan Surat Suara berdasarkan hasil pemeriksaan ke dalam berita acara.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

2. Pengamanan Penyortiran dan Pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan.

- a. Setelah menerima Surat Suara, KPU Kabupaten Boyolali melakukan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara.

- b. KPU Kabupaten Boyolali menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan.
- c. KPU Kabupaten Boyolali dalam merekrut personel pelaksana untuk melakukan pekerjaan perlu memperhatikan:
 - 1) kemampuan membaca dan menulis;
 - 2) usia;
 - 3) jumlah barang;
 - 4) jumlah personel; dan
 - 5) alokasi waktu kerja yang tersedia.
- d. KPU Kabupaten Boyolali selama melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan/atau Bawaslu Kabupaten Boyolali.
- e. KPU Kabupaten Boyolali melakukan Penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemisahan Surat Suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan:
 - 1) Surat Suara yang baik:
 - (a) hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - (b) tidak terdapat cacat cetak berupa:
 - (1) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau
 - (2) foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin *web*; dan
 - (c) tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara; dan
 - 2) Surat Suara yang rusak merupakan Surat Suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- f. Setelah dilakukan Penyortiran Surat, dilakukan pelipatan Surat Suara.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelipatan Surat Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- h. Penghitungan Surat Suara dilakukan dengan cara menghitung Surat Suara yang baik dan kekurangannya.
- i. Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara akibat rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan, penerima barang di KPU Kabupaten Boyolali harus segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Boyolali.
- j. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan pihak Percetakan untuk segera mencetak kekurangan Surat Suara akibat rusak atau kurang dari alokasi untuk memenuhi kekurangan Surat Suara.
- k. Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara akibat salah kirim penerima barang di KPU Kabupaten Boyolali harus segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Boyolali.
- l. Dalam hal KPU Kabupaten Boyolali telah menerima Surat Suara sesuai alokasi yang ditetapkan, KPU Kabupaten Boyolali menuangkan ke dalam berita acara.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan serta format berita acara ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- n. Dalam melakukan pengamanan pada saat Pengepakan Surat Suara di tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Boyolali, personel pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) menyiapkan daftar alokasi kebutuhan Surat Suara per TPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali;
 - (2) menyusun Surat Suara sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
 - (3) melakukan pengecekan Surat Suara yang akan dimasukkan ke dalam sampul dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
 - (4) mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) lembar masing-masing jenis Surat Suara yang telah disortir dan dilipat dengan karet gelang atau pengikat;
 - (5) memasukkan setiap ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, kemudian sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;

- (6) memasukkan sampul kubus yang berisi Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka (5) ke dalam kantong plastik besar, yang berisi:
 - (a) sampul yang berisi formulir berita acara;
 - (b) sampul yang berisi sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - (c) sampul kosong untuk KPPS;
 - (d) tinta;
 - (e) karet pengikat Surat Suara;
 - (f) alat untuk mencoblos pilihan;
 - (g) segel;
 - (h) kantong plastik;
 - (i) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - (j) alat bantu tunanetra;
 - (7) memasukkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di dalam kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam angka (6) ke dalam kotak suara yang bermutu baik;
 - (8) menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada stiker kotak suara; dan
 - (9) menempelkan stiker sebagaimana dimaksud dalam angka (7) dan segel pada kotak suara.
- o. KPU Kabupaten Boyolali melakukan Pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- (1) bahan Pengepakan harus bermutu baik;
 - (2) kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan Surat Suara;
 - (3) Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan
 - (4) menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Boyolali secara lengkap dan tidak disingkat.
- p. Surat Suara yang telah dikemas harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara.
- q. Tempat penyimpanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (1) bebas banjir;
 - (2) instalasi listrik cukup memadai;

- (3) pintu gerbang yang aman;
 - (4) dinding, lantai, dan atap tempat Penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - (5) pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
 - (6) letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - (7) tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
 - (8) terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang.
- r. Penyimpanan kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik;
 - (2) diberi stiker kotak suara; dan
 - (3) ditumpuk per kecamatan dan diberi nama kecamatan.

3. Pengamanan Pendistribusian

- a. Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali melakukan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS.
- b. Kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.
- c. KPU Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten Boyolali hingga ke TPS, sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana Pendistribusian;
 - 2) menetapkan pembagian wilayah Pendistribusian;
 - 3) menyusun rencana moda angkutan melalui darat, laut, dan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan;
 - 4) mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - 5) menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan dengan PPK, PPS dan KPPS.

- d. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran distribusi, KPU Kabupaten Boyolali dapat menggunakan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan pengangkutan dan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
- e. Penyedia layanan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - (1) memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - (2) memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/ sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
 - (3) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
 - (4) secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
 - (5) tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
 - (6) merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - (7) belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
 - (8) memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - (9) memiliki pertanggungan asuransi.
- f. KPU Kabupaten Boyolali melakukan Pengawalan pendistribusian Surat Suara Pilup Boyolali 2020.
- g. Pengawalan Pendistribusian Surat Suara dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan diserahkan kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS selaku pihak yang menerima.
- h. KPU Kabupaten Boyolali berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pilup Boyolali 2020 lainnya.

- i. Pemantauan dilakukan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai dengan alamat tujuan.
 - j. Pemantauan dilakukan dengan cara:
 - (1) memeriksa dan meneliti Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.
 - (2) mengecek setiap pelaksanaan pengiriman kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS;
 - (3) memastikan Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
 - (4) membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya secara berkala.
 - k. Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan ditetapkan dengan Keputusan KPU.
4. Pengamanan Pemusnahan
 - a. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Pemusnahan Surat Suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan/atau Bawaslu Kabupaten Boyolali.
 - c. Pemusnahan Surat Suara dilakukan di kantor KPU Kabupaten Boyolali.
 - d. Pemusnahan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Boyolali, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan/atau Bawaslu Kabupaten Boyolali.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten Boyolali dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan.
2. Pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB VI
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman Pengamanan Surat Suara Dalam Pilbup Boyolali 2020.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 8 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

